BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya untuk mewujudkan pencapaian tujuan perusahaan dalam organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta dibutuhkan pengelolaan keuangan, yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah ada sebelumnya. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan (PP Nomor 71 tahun 2010).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kini diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam penyusunan laporan keuangan. Pelaksanaan LKPD disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan konsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Laporan keuangan pemerintah daerah akan menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah wajib memperhatikan penyajian informasi

guna untuk dijadikan keperluan model perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingankan, dan dapat dipahami (Darise, 2008: 58).

Menghasilkan kualitas dari pelaporan keuangan maka dibutuhkan Kompetensi khususnya sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dan handal dalam menyusun laporan keuangan. Jika SDM mempunyai pengetahuan dalam menyusun laporan keuangan maka SDM akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sebaliknya jika SDM tidak mempunyai atau kurang memahami pengetahuan dalam menyusun laporan keuangan maka SDM akan menghasilkan laporan keuangan yang tidak berkualitas pula.

Menurut McClelland dalam Rifai (2011:299) mengemukakan kompetensi (*competency*) sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki sesesorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Terdapat enam komponen yang harus dimiliki seseorang untuk membentuk seseorang agar dapat menjadi aparatur yang berkompeten yaitu : Motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, keterampilan. Jadi sumber daya manusia yang berkompeten harus memiliki motif untuk bertindak dan mengarahkan seseorang untuk

mencapai tujuannya, memiliki sifat atau karakter fisik, memiliki konsep diri atau percaya diri, memiliki pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki seseorang, memiliki keterampilan atau kemampuan mengerjakan pekerjaan.

Selain kompetensi, hal yang juga berhubungan dengan kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan adalah Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementrian negara/lembaga menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK. 05/2007. Sistem akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementrian Negara/Ketua Lembaga Teknis yang melakukan pemprosesan data transaksi keuangan berupa laporan realisasi angaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari dua sub bagian, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL) yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran, Neraca, dan Catatan atas laporan keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan. Sistem akuntansi instansi menurut Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari (LRA) Laporan Realisasi Anggaran, (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, (LO)Laporan Operasional, (LAK) Laporan Arus Kas, (LPE) Laporan Perubahan Ekuitas, (CaLK) catatan atas laporan keuangan. Bastian (2007:4) mengungkapkan jika belum memahami sIstem akuntansi instansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi akuntansi atau laporan keuangan. Sistem akuntansi dapat memudahkan pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah baik secara manual maupun dilakukan dengan aplikasi komputer.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dan hasil wawancara pada dengan salah satu pegawai pada Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan Aset Daerah Kota Gorontalo, beliau mengatakan bahwa masih rendahnya kualitas laporan keuangan pada instansi tersebut dan masih kurangnya pemahaman dari sistem akuntansi instansi. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari tingkat kompetensi yang dimiliki oleh aparatur, jika aparatur mempunyai kompetensi yang berkualitas maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik, sebaliknya jika aparatur tidak mempunyai kompetensi yang berkualitas maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang kurang baik pula. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah terjadi. SDM yang ada masih belum memahami pengetahuan dalam bidangnya.

Kemudian kualitas laporan keuangan pada DPPKAD masih rendah dan aparatur pada instansi tersebut masih kurang berkompeten hal itu

didukung oleh sistem akuntansi pada tahun 2014 masih berbasis kas, kemudian pada tahun 2015 diterapkannya sistem akuntansi berbasis akrual sehingga membuat SKPD harus mendapatkan pelatihan dan pembelajaran penuh mengenai *accrual basic.*

Hal ini dapat dilihat dari data tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Gorontalo. (Sumber, DPPKAD Kota Gorontalo)

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
Akuntansi	31 Orang
Non Akuntansi	49 Orang
Total	80 Orang

Sumber : DPPKAD Kota Gorontalo

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa aparatur yang mempunyai latar belakang pendidikan Ilmu akuntansi lebih sedikit dibandingkan dengan aparatur yang mempunyai latar belakang non akuntansi.

Hal ini disebabkan karena aparatur tidak memiliki kompetensi yang meliputi motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, keterampilan. Serta masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap penerapan sistem akuntansi instansi di DPPKAD Kota Gorontalo.

Laporan keuangan setiap tahunnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekaligus BPK akan memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah. Berikut adalah jenis-jenis

pendapat akuntan yaitu : Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Pendapat Tidak Wajar dan Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat.

Laporan Keuangan DPPKAD Tahun Anggaran 2009 BPK memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)” sampai pada tahun 2013. Kemudian Laporan Keuangan DPPKAD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014 BPK RI untuk pertama kalinya memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Walaupun DPPKAD sudah dikatakan WTP tetapi beberapa temuan signifikan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan sistem pengendalian intern yang perlu mendapat perhatian, (Sumber : DPPKAD Kota Gorontalo) antara lain:

1. Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Tahun Penetapan 1997 s.d 2011 Belum Dilakukan Rekonsiliasi
2. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib;
3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Belum Dilandasi Peraturan Daerah;
4. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Belum Seluruhnya Dilengkapi Dengan Nama Penanggung Jawab;
5. Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah.

Melihat beberapa temuan di atas dapat dilihat bahwa kompetensi aparatur dan sistem akuntansi instansi merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

Berangkat dari uraian diatas, peneliti mencoba untuk menguji kembali penelitian sebelumnya oleh Hazrita,dkk (2014), dengan judul "Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dilakukan Dilingkungan Kanwil Kementrian Agama Provinsi Riau" yang menyimpulkan bahwa kompetensi tidak mempengaruhi kualitas tanggung jawab pelaporan keuangan, sedangkan sistem akuntansi instansi (SAI) mempengaruhi pertanggungjawaban kualitas pelaporan keuangan. Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian peneliti, yaitu judul yang diambil oleh peneliti sebelumnya adalah pengaruh kompetensi dan sistem akuntansi terhadap kualitas pertanggung jawaban laporan keuangan pada satuan kerja dilakukan dilingkungan kanwil kementrian agama Provinsi Riau, sedangkan peneliti mengambil judul pengaruh kompetensi aparatur pengelola keuangan dan sistem akuntansi instansi terhadap kualitas laporan keuangan pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan aset daerah Kota Gorontalo, perbedaan lainnya juga dapat dilihat dari tempat dan waktu penelitian, dalam penelitian terdahulu yang menjadi tempat penelitiannya yaitu dilingkungan kanwil kementrian agama provinsi Riau dan waktu penelitiannya dilakukan pada tahun 2010

sedangkan penelitian peneliti bertempat di DPPKAD Kota Gorontalo dan waktu penelitiannya dilakukan pada tahun 2016.

Berdasarkan latar belakang, penelitian yang dilakukan sebelumnya, dan dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini dalam lingkup kerja Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Aset Daerah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Keungan Dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Gorontalo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keungan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kota Gorontalo.
2. Apakah penerapan Sistem Akuntasi Instansi berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keungan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kota Gorontalo.
3. Apakah Kompetensi Aparatur Pengelolah Keuangan (X1) dan penerapan Sistem Akuntasi Instansi (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kota Gorontalo.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara parsial pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Akuntasi Instansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara parsial pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Gorontalo.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan (X1) dan Penerapan Sistem Akuntasi Instansi (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara simultan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu akuntansi yaitu bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik.

b) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada aparat DPPKAD Kota Gorontalo dalam pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan kompetensi aparatur yang berkualitas. Sehingga diharapkan aparat DPPKAD dapat menyelenggarakan program– program pada peningkatan kualitas dan kapabilitas.